



PROSTITUSI KELING (Konstruksi Sosial Masyarakat dan Stigmatisasi)

Septi Purfitasari ✉

Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Agustus 2014
Disetujui September 2014
Dipublikasikan November 2014

Keywords:
Prostitutions;
Social Constructio;
Stigmatization

Abstrak

Keling memiliki prostitusi baik di perantauan maupun lokal. Praktik prostitusi lokal menunjukkan prostitusi terkait dengan sejarah dan budaya komunitas tersebut. Hal ini juga memunculkan stigmatisasi terhadap perempuan Keling. Penelitian ini mengkaji konstruksi sosial masyarakat Keling terhadap prostitusi dan stigmatisasi terhadap perempuan Keling. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data meliputi analisis tematis, analisis tekstual, dan analisis interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan konstruksi sosial prostitusi sebagai kesalahan perempuan yang terlalu tergiur materi dan mencoreng nama baik kyai, sebagai pekerjaan berpenghasilan tinggi, sebagai perusak kualitas generasi muda, sebagai penyebab penyebaran HIV/AIDS, dan sebagai hiburan yang bergengsi. (2) Stigmatisasi terhadap perempuan Keling, yaitu bukan perempuan baik-baik, cantik-cantik tetapi banyak yang PSK. Tokoh masyarakat tidak sepenuhnya mengakui stigmatisasi. Pelaku mengakui stigmatisasi, ada yang menyembunyikan, ada yang merasa bangga. Saran yang direkomendasikan adalah lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan latar belakang sosial budaya siswa sehingga proses transfer of values dalam pendidikan IPS lebih tepat dan dapat menghasilkan output yang baik. Tokoh kesehatan agar melakukan pendampingan dan sosialisasi terhadap remaja mengenai prostitusi dan resiko penularan penyakit. Tokoh agama agar memfasilitasi kegiatan keagamaan bagi generasi muda, tokoh masyarakat agar menertibkan prostitusi berkedok karaoke

Abstract

Implementation of Curriculum 2013 brought a change in the learning process. Regulation of the Minister of Education and Culture Number 65/2013 about Standard Process Primary and Secondary Education hinted on the need for the learning process guided by the rules of scientific approach. Scientific approach is applied to all subjects for all levels. The application of scientific approach certainly can cause its own difficulties, especially in subjects such non inexact social studies. This study sought to conduct a study of 2013 Implementation curriculum in social studies in junior high schools Semarang region that already implement the curriculum 2013 in the academic year 2013/2014.

This study uses a qualitative descriptive approach. Data collection methods used in this study were interviews, observation and documentation. The results showed that the general implementation of Curriculum 2013 in social studies in junior high schools Semarang city region approach Mutual Adaptation of curriculum implementation, teacher social studies teacher and still having some problems adjusting to the real conditions in the field. This is evidenced in conducting learning social studies teachers are already using a scientific approach, but most are just learning social studies in the classroom so that less provide less tangible experience learning on the learner.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

Pendahuluan

Prostitusi merupakan permasalahan yang kompleks dan telah ada sepanjang peradaban manusia. Tak jarang, prostitusi dipandang sebagai “pekerjaan” tertua di dunia. Sejak awal 1980an, para ahli mulai membedakan antara perilaku sosial dengan identitas seksual dan mulai mengakui adanya variasi dalam perilaku seksual serta perubahan makna seksual dari waktu ke waktu. Para ahli kemudian menentang kebijakan konvensional yang menyatakan bahwa seksualitas adalah hasil biologis atau dorongan psikologis semata, di luar jangkauan kekuatan sosial. Misal, Gayle Rubin (Rubin: 1984, Bernstein: 2013) yang mengemukakan adanya hirarki dalam praktik seksual. Menurut Rubin, beberapa praktik seksual dianggap normal, alami dan baik, sementara yang lain diberi label tidak wajar atau menyimpang. Hirarki ini menunjukkan bahwa praktik seksual berada dalam ranah sosial dimana sebagian praktik seksual dianggap baik dan diterima oleh masyarakat sementara sebagian yang lain ditolak dan dianggap menyimpang.

Koentjoro, melalui penelitiannya, yang kemudian dibukukan dengan judul *On The Spot*, Tutur dari Sarang Pelacur (2004), telah melakukan riset bertahun-tahun di sejumlah pedesaan dan perkotaan yang ia kategorikan sebagai “daerah penghasil pelacur”. Koentjoro mengkategorikan sejumlah daerah sebagai daerah penghasil pelacur karena berdasarkan risetnya pada tahun 1988, 1989, dan 1992 menunjukkan bahwa 65% pekerja seks ternyata berasal dari sejumlah daerah tertentu. Penelitian Koentjoro memasukkan Jepara sebagai salah satu daerah yang ia kategorikan sebagai penghasil pelacur (Koentjoro, 2004: 76), meskipun dalam bukunya ia menyamakan semua identitas wilayah penelitiannya sehingga tidak diketahui secara detail lokasi tepatnya. Namun, setidaknya masuknya Jepara dalam kategori daerah penghasil pelacur pada penelitian Koentjoro turut menempatkan posisi Jepara dalam pemetaan daerah penghasil pelacur di Jawa Tengah.

Jepara ditengarai menjadi daerah penghasil pelacur untuk dikirim ke berbagai kota besar ataupun adanya praktik prostitusi lokal. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan data statistik yang menunjukkan tingginya kasus HIV/AIDS di Jepara. Meskipun kabupaten Jepara bukan merupakan daerah yang dilewati jalan utama antarpropinsi, namun kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jepara sangat tinggi. Tahun 2013, Jepara merupakan kabupaten dengan kasus HIV & AIDS peringkat ke 6 di Provinsi Jawa Tengah ([\[koranmuria.com\]\(http://koranmuria.com\)\) dan pada tahun 2012 untuk AIDS, Jepara sempat menempati urutan pertama di provinsi Jawa Tengah \(<http://kpan.or.id>\). Kebanyakan penderita di Kabupaten Jepara merupakan orang-orang yang merantau ke luar kota dan pulang sudah dalam kondisi AIDS. Praktik prostitusi juga mendorong pemerintah kabupaten Jepara merevisi Perda Nomor 09 Tahun 1954 Tentang Pemberantasan Pelacuran, dengan perda Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pelacuran.](http://</p>
</div>
<div data-bbox=)

Prostitusi selama ini menjadi permasalahan kompleks yang dikaji melalui berbagai pendekatan. Penelitian ini mengkaji bagaimana konstruksi sosial dalam sebuah komunitas dengan praktik prostitusi yang berlangsung dari generasi ke generasi. Selain itu, prostitusi di Keling tidak hanya terjadi di perantauan, dimana sebagian perempuan Keling terjun dalam prostitusi di berbagai kota besar. Prostitusi juga berkembang dalam praktik lokal secara terselubung. Puluhan tahun lalu, prostitusi lokal di Keling berupa warung-warung yang secara terang-terangan menjajakan pelayana seks. Saat ini prostitusi lokal masih ada hanya saja lebih terselubung berupa jaringan via SMS ataupun berkedok café dan karaoke. Menurut Ingleson, jika prostitusi tidak hanya terjadi di perantauan namun juga di daerah asal para PSK maka menunjukkan bahwa prostitusi di daerah tersebut sangat terkait dengan sejarahnya sehingga prostitusi sudah menjadi bagian budaya dari komunitas tersebut (Ingleson, 1986; Koentjoro, 2013). Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada dialektika Berger dan Luckmann mengenai konstruksi sosial yang tersirat dalam tiga momen yang saling berkaitan yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

Selain itu, adanya praktik prostitusi di Keling juga memunculkan labeling atau stigmatisasi terhadap perempuan Keling. Menurut Erving Goffman (1963), stigma adalah segala bentuk atribut fisik dan sosial yang mengurangi identitas sosial seseorang, mendiskualifikasikan orang itu dari penerimaan masyarakat. Stigma yang diterima oleh perempuan Keling misal, bahwa mereka rentan terlibat prostitusi, bukan perempuan baik-baik, perempuan gampang. Pelaku prostitusi bisa saja perempuan, laki-laki (gigolo), atau transgender. Bahkan, dalam beberapa kasus prostitusi yang dilakukan oleh perempuan, pun tetap melibatkan laki-laki sebagai klien ataupun geromo. Namun, perempuan tetap menjadi pihak yang paling disalahkan, dianggap sebagai penyebab kemerosotan moral, dan paling banyak dikenai label buruk (stigma). Seperti dikemuka-

kan pula oleh Ditmore, bahwa pelacur adalah prototipe dari perempuan yang terstigmatisasi (Ditmore, 2006: 461). Kata “pelacur” bagaimana pun juga hanya mengacu pada pelacur. Pelacur adalah yang “tidak suci”, wanita yang terlibat dalam hubungan seksual yang melanggar hukum dan tidak bermoral, jauh dari kesucian, keperawanan, kesopanan, pengendalian diri, dan kesederhanaan (Pheterson, 1996; Ditmore, 2006). Stigma semacam ini juga dilekatkan pada perempuan Keling. Maka, penelitian ini juga mengkaji bagaimana stigmatisasi yang dibangun masyarakat terhadap perempuan Keling.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif untuk memahami bagaimana masyarakat Keling memaknai prostitusi, pengalaman-pengalaman mereka terkait prostitusi, serta bagaimana mereka menafsirkan dan mengambil pilihan sehingga dapat diperoleh gambaran konstruksi sosial mereka terhadap prostitusi. Data deskriptif juga dihasilkan untuk memperoleh pemaknaan masyarakat Keling atas stigmatisasi yang dilekatkan pada mereka serta bagaimana mereka menanggapi stigmatisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Mason bahwa penelitian kualitatif adalah strategi penyelidikan yang ditujukan untuk membedakan bagaimana memahami manusia, pengalaman, menafsirkan, dan menghasilkan dunia sosial (Mason, 1996; Sandelowski, 2004).

Penelitian mengambil lokasi di kecamatan Keling, Jepara, Jawa Tengah. Pengambilan Keling sebagai lokasi penelitian karena kawasan ini memiliki riwayat praktik prostitusi yang panjang dan masih berlangsung sampai sekarang. Selain itu, praktik prostitusi tidak hanya berlangsung di perantauan namun juga dalam bentuk prostitusi lokal di wilayah Keling. Teknik cuplikan dalam penelitian ini adalah teknik snowball sampling. Penggunaan *snowball sampling* digunakan karena peneliti tidak banyak mengetahui tentang populasi penelitian. Peneliti hanya mengetahui sedikit saja orang yang dapat dijadikan informan kunci (*key informan*), kemudian meminta mereka untuk menunjukkan orang lain yang dapat dijadikan informan selanjutnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Pada perkembangan penelitian kualitatif, keabsahan penelitian saat ini mengacu pada seberapa akurat penilaian yang dibuat oleh peneliti

sesuai dengan sifat fenomena yang ia kaji, situasi dan kondisi penelitian, karakter peneliti, dsb. (Smith, Lewis-Beck, dkk: 2004). Mengacu pada keabsahan data yang ingin diperoleh, maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan melakukan checking data, membandingkan data yang diperoleh dengan data yang lain. Misal, membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dari perempuan pelaku prostitusi dan bukan pelaku, dari tokoh-tokoh masyarakat, dsb.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematis, analitis tekstual, dan analitis interpretatif. Analisis tematis dilakukan dengan mengorganisasi data sesuai tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian sehingga ditemukan ungkapan-ungkapan, uraian, atau penjelasan yang spesifik mengenai gambaran konstruksi sosial masyarakat Keling terhadap prostitusi dan stigmatisasi terhadap perempuan Keling. Analisis tekstual dilakukan dengan mengkonfirmasi data temuan dengan teori konstruksi sosial menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dan teori stigmatisasi Erving Goffman. Melalui langkah ini dapat dilihat apakah ada kesesuaian temuan dengan teori atau perlu adanya kesenjangan antara temuan penelitian dengan teori yang digunakan ketika digunakan untuk menganalisis temuan penelitian ini. Sementara analisis interpretatif dilakukan dengan melihat makna-makna yang terkandung dalam setiap data temuan.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi sosial masyarakat Keling terhadap prostitusi sebagai berikut: (1) Pada umumnya, masyarakat Keling mengkonstruksi prostitusi sebagai hal yang sudah biasa, menjadi budaya dalam masyarakat mereka, (2) Pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi yaitu perantara, pelaku, dan fasilitator mengkonstruksi prostitusi sebagai cara untuk memperoleh penghasilan yang tinggi. Prostitusi sebagai pekerjaan yang layak dipilih demi meraih keuntungan secara ekonomi, (3) Tokoh agama mengkonstruksi prostitusi sebagai akibat dari kesalahan perempuan yang terlalu tergiur pada materi hingga menghalalkan segala cara, prostitusi juga dinilai mencoreng nama baik kyai di Keling, (4) Tokoh kesehatan mengkonstruksi prostitusi Keling sebagai penyebab penyebaran penyakit, terutama HIV/AIDS, (5) Tokoh pendidikan mengkonstruksi prostitusi sebagai perusak kualitas generasi muda Keling, (6) Klien

mengkonstruksi prostitusi sebagai sarana hiburan yang bergengsi.

Mengacu pada teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann bahwa konstruksi sosial terbentuk melalui dialektika momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi maka dapat dianalisis bahwa konstruksi sosial masyarakat Keling dibentuk oleh dialektika tersebut. Bagi pihak-pihak yang terjun dalam prostitusi seperti PSK, perantara (germo), fasilitator (pemilik café dan karaoke), mereka mengalami proses eksternalisasi berupa perolehan kebudayaan. Adanya rujukan di masa lalu, modeling atas pilihan mereka yang meyakini bahwa prostitusi di Keling sudah berlangsung lama dan dilakukan oleh banyak orang selain mereka. Perolehan budaya ini selanjutnya memunculkan toleransi akan prostitusi dalam diri mereka sehingga mereka menyerap nilai-nilai penyimpangan tersebut. Selanjutnya mereka mengalami proses habituasi, pembiasaan atas pilihan dan tindakan mereka, sehingga prostitusi pun menjadi hal yang dianggap benar dan terlembaga dalam diri mereka. Mereka pun mengidentifikasi pilihan tersebut sebagai bagian dari identitas diri yang terinternalisasi, apakah sebagai perantara, sebagai PSK, sebagai pebisnis yang memiliki bisnis prostitusi dalam bentuk café dan karaoke, ataupun sebagai klien yang memiliki banyak uang dan menjadikan prostitusi sebagai hiburan yang bergengsi, karena laki-laki yang sanggup membeli jasa pelayanan seks berarti laki-laki dengan kondisi perekonomian yang mapan, kaya, atau pengusaha.

Seperti digambarkan dalam rangkaian analisis di atas, penelitian ini dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Sesuai dengan apa yang dikemukakan kedua tokoh tersebut, konstruksi sosial masyarakat Keling terhadap prostitusi dapat dianalisis melalui dialektika eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Namun, menjadi bias ketika berbicara mengenai aspek proses. Berger dan Luckmann secara teoritis membayangkan ketiga momen sebagai proses dialektika yang selalu lentur dan kontinu. Sementara pada kenyataannya, tidak selalu demikian.

Berger dan Luckmann berusaha mencari titik temu antara realitas objektif dan subjektif, dimana individu memiliki peran yang menentukan, namun di sisi lain, individu juga digerakkan dan dipengaruhi oleh struktur. Titik temu yang dibayangkan oleh mereka dibangun berdasar pengaruh pemikiran akan makna (common sense) yang dikemukakan Schutz, yang menghasilkan watak ganda masyarakat yaitu masyarakat sebagai kenyataan subyektif (Weber) dan masyarakat sebagai

kenyataan obyektif (Durkheim), yang terus ber-dialektika (Marx). Titik temu inilah yang menjadi dasar teori konstruksi sosial mereka, bahwa sepanjang perjalanan sejarahnya, dari masa silam ke masa kini, kenyataan sosial sehari-hari ditata dan diterima, untuk melegitimasi konstruksi sosial yang sudah ada dan memberikan makna pada berbagai bidang pengalaman individu sehari-hari.

Pada kasus Keling, memandang proses konstruksi sosial dengan cara demikian, dapat menimbulkan ketidaktegasan stand point. Jika konstruksi selalu berupa benang merah realitas objektif dan subjektif dimana manusia pada satu sisi adalah makhluk kreatif yang senantiasa mengkonstruksi makna, sementara di sisi lain adalah berada di bawah struktur. Maka, yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah masyarakat Keling mengkonstruksi prostitusi sebagai makhluk kreatif, yaitu sebagai will constructor atau hanya sekedar sebagai penerima, receiver saja. Pada titik inilah, posisi tengah ataupun benang merah yang diungkapkan Berger dan Luckmann tidak selamanya terjadi, dan dapat menimbulkan sisi yang justru bersifat bias.

Misal, prostitusi yang dilakukan oleh perempuan Keling dari generasi ke generasi, apakah sebagai bukti bahwa mereka makhluk kreatif yang sepenuhnya membangun makna tentang prostitusi atau sekedar menerima keadaan saja. Pada kasus Susi, ia yang terpaksa menjalani 7 tahun bekerja sebagai PSK setelah mengalami kegagalan dalam pernikahan. Menikah muda pada usia 16 tahun namun 2 tahun kemudian bercerai. Seorang janda muda dengan satu anak, yang juga merupakan anak pertama, kemudian menanggung beban sosial. Ia menjadi tulang punggung keluarga, memenuhi kebutuhan anak laki-lakinya, seorang adik perempuan, seorang adik laki-laki dan kedua orangtua, sang ayah yang tidak pernah memiliki pekerjaan yang jelas.

Orientasi materi keluarga, mendorong Susi sebagai anak perempuan harus bekerja keras. Begitu pula ketika ia menjadi PSK di Jakarta, terjebak dalam pola kerja dengan germo yang sangat mengekang dan merugikan dirinya. Dikekang tanpa ada kebebasan untuk keluar rumah, bahkan tidak pernah tahu di hotel apa tepatnya ia setiap hari bekerja karena selalu diantar ke lokasi kerja dengan memutar jalan terlebih dahulu. Setiap kali melayani klien, ia hanya memperoleh tarif 200 ribu dimana sebagian uang tersebut harus dihitung sebagai jatah germo. Artinya, dalam satu kali transaksi, ia hanya memperoleh 100 ribu saja. Jadi, pada kasus ini

yang nampak justru sebuah ketidakberdayaan perempuan.

Pada kenyataannya, seringkali kepentingan tertentu mengarahkan pada satu metode penafsiran. Sehingga tanpa disadari, konstruksi sosial yang terbentuk bukan sepenuhnya hasil dialektika namun lebih sebagai sekedar menerima wacana yang diciptakan oleh negara ataupun pihak yang berkuasa. Terkadang, proses ini tidak begitu disadari, lebih dalam bentuk hegemoni wacana. Dalah hal ini, hegemoni wacana bahwa prostitusi adalah kesalahan perempuan.

Prostitusi diwacanakan sebagai penyimpangan sosial dimana pihak yang paling disalahkan adalah perempuan. Hal ini terkait konstruksi sosial seksualitas laki-laki dan perempuan. Seks menjadi lambang kekuasaan laki-laki, menciptakan ruang bagi dominasi mereka terhadap perempuan. Jika laki-laki menggunakan jasa pelayanan PSK bahkan bisa menjadi hal yang bergengsi, simbol kekuasaan dan kemapanan status sosial ekonomi. Sementara pihak perempuan sebagai pekerja seks ditempatkan sebagai pihak yang paling bersalah dan menjadi penyebab kemerosotan moral di masyarakat. Dan hegemoni ini dikukuhkan pula oleh negara (kekuasaan). Contoh kasus ini misal, pada bulan Oktober 2013 terjadi razia terhadap sejumlah perempuan separuh baya yang bekerja sebagai PSK di Pasar Hewan Keling pada malam hari. Berdasarkan penuturan dari Kepala Pasar Hewan, bahwa ia tidak dapat membubarkan praktik prostitusi tersebut karena merupakan prostitusi yang diorganisir sekelompok preman, dimana ia pun nyaris dihajar oleh mereka. Kemudian, bagian dari kekuasaan negara yaitu satpol PP merazia tempat tersebut di malam hari dengan mengejar para PSK yang berlarian menyelamatkan diri agar tidak tertangkap.

Kasus di atas, menunjukkan bahwa prostitusi masih berada dalam bayang-bayang hegemoni wacana oleh penguasa bahwa yang paling berhak disalahkan adalah perempuan, yang harus ditangkap adalah PSK. Padahal ada akar permasalahan yang lebih tepat untuk disentuh. Begitu pula germo ataupun klien, seringkali tidak tersentuh. Penelitian ini juga menemukan wacana semacam ini dalam pemikiran sejumlah tokoh masyarakat, seperti tokoh agama dan tokoh pendidikan. Mereka memandang prostitusi sebagai penyimpangan yang disebabkan oleh kesalahan perempuan. Dikemukakan oleh tokoh agama bahwa prostitusi muncul karena adanya perempuan yang tidak tahu bersyukur, tidak menerima keadaannya sehingga tergoda gemerlap duniawi dan mencari jalan pintas. Keberadaan para perempuan PSK juga dianggap mencoreng nama

baik kyai di Keling. Sementara tokoh pendidikan memandang prostitusi juga sebagai kesalahan perempuan yang berimbas pada rusaknya generasi muda Keling, karena menurut mereka, keluarga yang ibunya bekerja sebagai PSK otomatis akan menghasilkan generasi muda yang rusak. Hal ini menunjukkan konstruksi yang terbentuk belum tentu merupakan proses kreatif melalui dialektika ketiga momen, tetapi bisa jadi hanya sekedar proses menerima hegemoni wacana dari kekuasaan (negara).

Lebih lanjut, terkait stigmatisasi, muncul stigmatisasi terhadap perempuan Keling sebagai berikut: (1) Pemaknaan harfiah perempuan Keling sebagai keturunan Ratu Kalinyamat yang melakukan *topo wudo* wajar kalau bukan perempuan baik-baik, apalagi lokasi mereka berdekatan dengan petilasan Ratu Kalinyamat di gunung Donorojo, (2) Perempuan Keling banyak yang cantik namun bukan perempuan baik-baik karena gampang dan rentan menjadi PSK, (3) Orang Jakarta belum tentu tahu Jepara tapi pasti tahu Keling. Stigmatisasi ini muncul karena kebiasaan perempuan Keling merantau ke Jakarta untuk menjadi PSK. Selain itu juga disebabkan oleh fakta bahwa keberangkatan bus Jepara-Jakarta adalah dari Keling, yaitu terminal Sambungoyot. Bus ini distigmatisasi sebagai angkutan yang mengangkut perempuan-perempuan Keling menuju Jakarta untuk menjadi PSK.

Menurut Goffmann (1963), stigma adalah atribut yang sangat negatif yang dilekatkan oleh orang "normal" kepada orang-orang yang dianggap menyimpang dari ekspektasi warga masyarakat pada umumnya, dalam konteks interaksi sosial secara langsung maupun tidak langsung. Pada kasus prostitusi, stigmatisasi lebih banyak dilekatkan pada perempuan. Meskipun prostitusi merupakan kegiatan antara kedua belah pihak yaitu PSK dan klien, namun pada kenyataannya yang mendapat stigmatisasi adalah perempuan PSK. Hal ini berkaitan dengan seksualitas laki-laki dan perempuan yang berbeda secara normatif. Perempuan secara normatif dituntut untuk menjaga seksualitasnya, bukan mengumbarnya apalagi menjadikannya sebagai komoditas dalam prostitusi. Oleh karena itu, sudut pandang masyarakat terfokus pada perempuan. Bukan kepada siapa laki-laki yang membeli pelayanan seks atau siapa yang menyalurkan tetapi lebih kepada siapa "perempuan" yang bekerja sebagai pekerja seks komersial, sebagai pelacur. Dengan demikian, prostitusi dilihat sebagai pelanggaran norma yang dilakukan oleh perempuan sehingga stigma pun lebih dilekatkan pada perempuan.

Mengacu pada teori Goffmann, stigmatisasi terhadap perempuan Keling mengacu pada stigma *discredit*, yaitu stigma yang sudah diketahui oleh orang banyak. Sudah diketahui secara luas oleh masyarakat Keling maupun di luar Keling bahwa terdapat praktik prostitusi di Keling yang telah berlangsung sekian lama. Strategi masyarakat Keling dalam menanggapi stigmatisasi ini berupa teknik *covering*, yaitu mereka yang terstigmatisasi sudah diketahui oleh publik dan ia menerima stigma tersebut sebagai bagian dari dirinya. *Covering* bertujuan untuk meminimalisir agar stigma tidak tampak jelas sehingga tidak mengganggu interaksi sosial antara pemilik stigma dengan kelompok "normal". Pada beberapa kasus PSK yang beroperasi secara tersembunyi, meliputi stigma *discreditable*, yaitu yang belum diketahui oleh orang banyak, atau hanya sedikit orang yang mengetahui. Stigmatisasi ini ditanggapi oleh keduanya melalui strategi yang disebut Goffmann sebagai *passing*, yaitu upaya untuk menyamarkan/menyembunyikan stigma dari sekelompok orang yang tidak mengetahui stigma yang dimiliki. *Passing* dilakukan dengan cara melakukan perpindahan dari satu kelompok ke kelompok yang lain, yaitu ke kelompok yang stigmanya kurang atau tidak memiliki stigma. *Passing* hanya dapat dilakukan jika pihak lain belum mengetahui tentang atribut stigma ataupun hanya sedikit pihak yang mengetahui.

Stigmatisasi terhadap perempuan Keling sepenuhnya disadari oleh warga Keling. Mereka mengakui dan menyadari bahwa stigmatisasi tersebut telah tersebar luas di luar masyarakat Keling, dan diyakini pula oleh sebagian masyarakat Keling sendiri. Perbedaan terletak bagaimana mereka menanggapi stigmatisasi tersebut. Bagi pihak-pihak yang terlibat seperti perantara, pelaku, dan fasilitator stigmatisasi tidak dilihat sebagai hal yang perlu sepenuhnya disembunyikan. Meski mereka melakukan sejumlah upaya untuk mengontrol informasi dalam mengantisipasi dampak stigmatisasi, namun mereka tidak sepenuhnya khawatir jika stigmatisasi terhadap diri mereka sepenuhnya terbongkar. Misal, pada kasus pelaku, mereka mengakui adanya stigmatisasi terhadap perempuan Keling dan menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari yang terstigmatisasi. Mereka melakukan upaya yaitu mengurangi interaksi terbuka di sekolah untuk melindungi status mereka yang bekerjasama dalam menjalankan aktivitas prostitusi.

Sementara tokoh agama, meski mengakui stigmatisasi terhadap perempuan Keling, namun juga berusaha keras menutupi stigma dengan menyatakan bahwa prostitusi Keling tidak perlu

di besar-besarkan karena realitas ini jamak ada di berbagai masyarakat, bukan hanya Keling. Selain itu, tokoh agama juga meyakini bahwa stigmatisasi terhadap perempuan Keling telah mencoreng nama baik kyai di wilayah tersebut. Salah satu persamaan dalam menanggapi stigmatisasi adalah baik tokoh aparat desa, tokoh kesehatan maupun tokoh agama berusaha mengontrol informasi atas stigmatisasi dengan menyatakan bahwa stigmatisasi terhadap perempuan Keling hanyalah warisan masa lalu, atas kejayaan prostitusi Keling di masa lalu sehingga banyak perempuan pelaku prostitusi dari berbagai daerah mengaku berasal dari Keling demi mendongkrak citra mereka.

Seluruh informan perempuan dalam penelitian ini mengakui adanya stigmatisasi terhadap perempuan Keling yang terkenal tidak baik, gampang, rentan menjadi PSK. Sebagian merasa malu, namun ada pula yang merasa bangga. Misal, seorang remaja yang berperan sebagai geromo, ia merasa bangga atas stigmatisasi bahwa perempuan Keling cantik-cantik namun banyak yang menjadi PSK. Ia menanggapi stigmatisasi tersebut justru sebagai hal yang membanggakan karena perempuan Keling memiliki kualitas yang bagus daripada perempuan dari daerah lain. Hal ini menjadi prestise dan pamor tersendiri dalam dunia prostitusi.

Pada masyarakat Keling sendiri prostitusi dikonstruksi sebagai hal yang sudah biasa, sehingga stigmatisasi terhadap pelaku prostitusi di dalam masyarakat Keling tidak begitu kentara. Seorang PSK dapat diterima dengan baik, terutama mereka yang bekerja sebagai PSK di perantaraan, akan diterima lebih baik dibandingkan dengan perempuan PSK yang beroperasi pada prostitusi lokal. Hal ini karena ada sebagian warga yang mengkonstruksikan prostitusi sebagian bagian budaya yang sudah mengakar dan mereka piker tidak ada yang dapat mereka lakukan selain menerima realitas. Selanjutnya, mereka memilih untuk lebih mentoleransi prostitusi di perantaraan, karena tidak begitu kentara, dibandingkan prostitusi lokal. Selain itu, juga terdapat contoh para mantan PSK yang bertransformasi menjadi tokoh masyarakat dan masa lalu mereka tidak pernah diungkit lagi. Mereka menjadi orang terpuja dalam masyarakat setelah menikah dengan laki-laki terhormat di masyarakat, menjadi ibu kaji (haji) yang disegani.

Hal ini menunjukkan bahwa stigmatisasi terhadap perempuan PSK dalam masyarakat Keling sendiri tidak begitu jelas. Apa yang dibayangkan oleh Goffman tentang pelaku penyimpangan sosial akan mengalami stigmatisasi, didiskreditkan dari penerimaan masyarakat ternyata tidak

sepenuhnya berlaku pada kasus prostitusi Keling. Bukannya terstigmatisasi, perempuan pelaku prostitusi di Keling meski tidak menyembunyikan identitasnya tetap diperlakukan dengan baik di masyarakat. Perempuan PSK juga masih memiliki peluang memperoleh jodoh yang berkualitas, menjadi tokoh terpandang di masyarakat, menjadi aktivis pengajian, menjadi “ibu kaji” yang dihormati di masyarakat. Suatu penyimpangan sosial tidak selalu menempatkan pelakunya dalam posisi terstigmatisasi, atau didiskreditkan oleh orang-orang di sekitarnya. Hal ini terjadi bila suatu masyarakat justru mengkonstruksi penyimpangan sosial sebagai hal yang lumrah. Oleh karena itu, stigmatisasi, perlakuan diskredit terhadap individu yang menyimpang menjadi tidak begitu kentara.

Simpulan

Konstruksi sosial masyarakat Keling terhadap prostitusi yaitu masyarakat Keling mengkonstruksi prostitusi sebagai realitas sosial yang telah ada sejak lama, menjadi bagian dari budaya mereka. Tokoh agama mengkonstruksi prostitusi sebagai kesalahan perempuan akibat tergiur gemerlap duniawi dan mencoreng nama baik kyai setempat. Aparat desa mengkonstruksi prostitusi sebagai konsekuensi pemaknaan harfiah terkait leluhur mereka yaitu Ratu Kalinyamat yang melakukan *topo wudo*. Pihak-pihak yang terlibat yaitu

perantara, pelaku, dan fasilitator mengkonstruksi prostitusi sebagai sumber pendapatan. Tokoh kesehatan mengkonstruksi prostitusi sebagai penyebab tingginya kasus HIV/AIDS, dan klien mengkonstruksi prostitusi sebagai sarana hiburan dan prestise. Sementara terkait dengan stigmatisasi, masyarakat Keling mengakui adanya stigma, sebagian berusaha menutupi stigma, sementara pihak perantara justru merasa bangga dengan stigmatisasi, yang baginya justru menunjukkan “kualitas” perempuan Keling lebih baik daripada perempuan di daerah lain.

Daftar Pustaka

- Berger, L. Peter & Thomas Luckmann. 2013. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3S
- Bernstein, Mary. 2013. *The Sociology of Sexualities: Taking Stock of the Field. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews* 42: 22. Diakses melalui <http://csx.sagepub.com/content/42/1/22>, 21 September 2013
- Ditmore, Melissa Hope (Editor). 2006. *Encyclopedia of Prostitution and Sex Work, Volumes 1&2*. London : Greenwood Press. Diakses melalui bookos.org, 20 September 2013
- Goffman, Erving. 1963. *Stigma, Notes on the Management of Spoiled Identity*. London: Penguin. Diakses melalui bookos.org, 20 September 2013
- Koentjoro. 2004. *On The Spot: Tutur dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta